

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kondisi Inflasi April 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/ kota, pada April 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,50 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,85 pada April 2025 menjadi 110,55 pada April 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,57 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,61 persen.

Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Inflasi Nasional

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,13 persen lebih rendah dari inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,57.

Sedangkan inflasi year-on-year (y-on-y) Nasional sebesar 2,42 persen, lebih rendah dari inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,50 persen.

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok kesehatan masing - masing sebesar 0,43 persen; kelompok transportasi sebesar 2,81 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,98 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,48 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,24 persen.

Pada April 2026, sebelas kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,31 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42 persen; kelompok transportasi sebesar 0,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok pendidikan serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,11 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing sebesar 0,02 persen; dan kelompok kesehatan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,01 persen.

Komoditas Penyumbang Inflasi

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2026, antara lain: emas perhiasan, beras, angkutan udara, daging ayam ras, ikan baung, ikan nila, ikan kembung, ikan tongkol, telur ayam ras, ikan bandeng, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, sigaret putih mesin (SPM), ikan tenggiri, pelumas/oli mesin, bimbingan belajar, gula pasir, kacang panjang, sepeda motor, kol putih/kubis, ketimun, daging sapi dan mobil. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai rawit, udang basah, bawang putih, daging

babi, cabai merah, sawi hijau, kentang, sabun detergen bubuk, jeruk, pembersih lantai, dan pengharum cucian/pelembut.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2026, antara lain: angkutan udara, beras, minyak goreng, cabai rawit, ikan kembung, pelumas/oli mesin, bahan bakar rumah tangga, tomat, ketimun, ikan tongkol, ikan tenggiri, gula pasir, kentang, bayam, wortel, lemari pakaian, ikan baung, sigaret kretek mesin (SKM), kangkung, laptop/notebook, ikan nila, semangka, buah naga, cabai merah dan ikan lele. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: daging ayam ras, emas perhiasan, telur ayam ras, dan jeruk.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada April 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 112,71, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 2,15 persen dengan IHK sebesar 109,45.

Kondisi Inflasi Mei 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/ kota, pada Mei 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,29 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,37 pada Mei 2025 menjadi 110,90 pada Mei 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,32 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,93 persen.

Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Inflasi Nasional

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,28 persen lebih rendah dari inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,32.

Sedangkan inflasi *year on year* (y-on-y) Nasional sebesar 3,08 persen, lebih rendah dari inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,29 persen.

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,78 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,60 persen; kelompok transportasi sebesar 4,52 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,53 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 1,92 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,88 persen.

Pada Mei 2026, sebelas kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,67 persen; kelompok transportasi sebesar 0,51 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39

persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,11 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03; dan kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen.

Komoditas Penyumbang Inflasi

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2026, antara lain: emas perhiasan, beras, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, bawang merah, pemeliharaan/service, minyak goreng, sawi hijau, ikan nila, pelumas/oli mesin, ikan bandeng, ikan tongkol, sigaret kretek mesin (SKM), kacang panjang, ikan tenggiri, sigaret putih mesin (SPM), cabai rawit, ikan kembung, daging sapi, bayam, sepeda motor, gula pasir, telepon seluler, bimbingan belajar, mobil, kue basah, dan bakso siap santap. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: udang basah, daging babi, sabun detergen bubuk, bawang putih, jeruk, cumi-cumi, pengharum cucian/pelembut, biskuit, dan terong.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2026, antara lain: bakar rumah tangga, pemeliharaan/service, sawi hijau, ikan baung, pelumas/ oli mesin, bawang merah, minyak goreng, beras, perbaikan ringan kendaraan, telepon seluler, ikan tongkol, kacang panjang, bakso siap santap, kue basah, buncis, kursi, ketimun, tangki penampungan air, cat tembok, nasi dengan lauk, dan solar. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: telur ayam ras, cabai rawit, angkutan udara, daging ayam ras, ikan kembung, cumi-cumi, kangkung, udang basah, cabai merah, emas perhiasan, kol/kubis, ikan bawal, wortel, kentang, dan biskuit.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada Mei 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 3,65 persen dengan IHK sebesar 113,02, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Singkawang sebesar 2,73 persen dengan IHK sebesar 109,81.

Kondisi Inflasi Juni 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/ kota, pada Juni 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,28 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,71 pada Juni 2025 menjadi 111,24 pada Juni 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,31 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,24 persen.

Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Inflasi Nasional

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,44 persen lebih tinggi dari inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,31.

Sedangkan inflasi *year on year* (y-on-y) Nasional sebesar 3,34 persen, lebih tinggi dari inflasi

year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,28 persen.

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,28 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,69 persen; kelompok transportasi sebesar 5,11 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,47 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 1,82 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,81 persen.

Pada Juni 2026, sebelas kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,55 persen; kelompok transportasi sebesar 0,59 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen.

Komoditas Penyumbang Inflasi

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2026, antara lain: emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, tarif angkutan udara, minyak goreng, ikan nila, pelumas/oli mesin, pemeliharaan/service, cabai rawit, ikan tongkol, bensin, sigaret kretek mesin (SKM), ikan kembung, ikan bandeng, bawang merah, ikan tenggiri, sigaret putih mesin (SPM), daging sapi, sawi hijau, kangkung, telepon seluler, bimbingan belajar, cabai merah, gula pasir, sepeda motor, lemari pakaian, sigaret kretek tangan (SKT), mobil, kue basah, laptop/notebook, dan bakso siap santap. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ketimun, udang basah, daging babi, terong, popok bayi sekali pakai/diapers, sabun detergen bubuk, biskuit, bayam, dan daging ayam ras.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Juni 2026, antara lain: tarif angkutan udara, bensin, ikan tongkol, wortel, pelumas/oli mesin, udang basah, minyak goreng, cabai rawit, cumi-cumi, ikan nila, air kemasan, ikan kembung, sigaret kretek mesin (SKM), lemari pakaian, ikan baung, kentang, dan beras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: sawi hijau, ketimun, kacang panjang, bayam, kangkung, dan buncis.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada Juni 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Sintang sebesar 3,71 persen

dengan IHK sebesar 110,96, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Singkawang sebesar 2,93 persen dengan IHK sebesar 110,31.

Prakiraan Resiko Inflasi Kalimantan Barat ke Depan

Memasuki Triwulan III 2026, stabilitas ekonomi daerah menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dengan beberapa risiko utama, diantaranya:

- Perkiraan puncak musim kemarau pada Agustus 2026 berpotensi berdampak pada hasil pertanian. Bulan Agustus diperkirakan menjadi periode dengan curah hujan paling rendah sehingga berisiko meningkatkan kekeringan, menurunkan produksi dan produktivitas, serta risiko kebakaran hutan. Di sisi lain, penurunan tinggi muka air sungai pada periode tersebut dapat menghambat distribusi logistik ke wilayah hulu Kalimantan Barat.
- Disparitas harga batubara yang cukup besar antara luar negeri dan dalam negeri berisiko mengganggu pasokan domestik khususnya untuk pemenuhan kebutuhan PLTU. Gangguan pemadaman bergilir perlu diantisipasi, apabila terjadi berkepanjangan akan mengganggu dunia usaha dalam penyediaan pasokan barang/jasa.
- Risiko kenaikan permintaan pangan, seiring dimulainya kembali operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah masa libur sekolah dan berlanjutnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Peningkatan aktivitas SPPG diperkirakan akan mendorong kenaikan kebutuhan berbagai komoditas pangan, terutama beras, telur ayam ras, daging ayam ras, sayuran, kedelai, termasuk susu UHT sebagai bahan baku penyediaan makanan. Per 29 Juni 2026, terdapat 470 unit SPPG di Kalimantan Barat dengan sasaran sekitar 1,21 juta penerima manfaat. Apabila pasokan tidak diimbangi dengan kelancaran distribusi dan kecukupan produksi, peningkatan permintaan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga pangan di sejumlah wilayah.
- Risiko inflasi barang impor, khususnya produk kedelai, gula, pupuk petrokimia, saprotan pertanian, material konstruksi, dan barang manufaktur yang dipengaruhi oleh potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang serta kenaikan biaya distribusi a.l. biaya kontainer dan ongkos angkutan, sehingga meningkatkan biaya pengadaan dan mendorong penyesuaian harga di pasar domestik.

Disisi lain terdapat beberapa faktor yang diperkirakan masih akan menahan kenaikan inflasi antara lain: penurunan harga beberapa BBM nonsubsidi dan avtur pada Juli 2026, penerapan B50 diharapkan mampu menjaga ketahanan pasokan solar subsidi, Pemerintah menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik dari 24 Juni s.d 5 Juli 2026, harga emas global mulai melandai.

Secara keseluruhan tahun 2026, Inflasi Kalimantan Barat diperkirakan masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Berbagai upaya pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada April 2026, Kalimantan Barat mencatat inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,57%, yang didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,35%. Kondisi ini

menegaskan bahwa volatilitas harga pangan masih menjadi sumber utama tekanan inflasi daerah, terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas inflasi Kalbar sangat bergantung pada kelancaran pasokan dan distribusi pangan.

Di luar pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara akibat lonjakan harga avtur yang meningkat signifikan seiring kenaikan harga minyak global. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal (*imported inflation*), khususnya melalui jalur energi dan transportasi.

Secara tahunan (*y-on-y*), inflasi Kalbar tercatat 2,50%, masih dalam kisaran terkendali. Namun demikian, pola inflasi menunjukkan bahwa komoditas pangan dan transportasi tetap menjadi penggerak utama, sehingga pengendalian inflasi perlu difokuskan pada komoditas kunci tersebut. Sementara itu, pergerakan harga emas yang cenderung menurun mengikuti tren global memberikan dampak terbatas terhadap inflasi.

Pada Mei 2026, Kalimantan Barat mencatat inflasi bulanan (*m-to-m*) sebesar 0,32%, yang didominasi oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,17%. Kenaikan harga pada kelompok tersebut erat kaitannya dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, yakni penyesuaian harga LPG non subsidi. Hal ini memberikan insight bahwa tekanan inflasi bulan ini lebih banyak bersumber dari faktor kebijakan (*administered prices*).

Di luar kelompok bahan bakar rumah tangga, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara akibat lonjakan harga avtur yang meningkat signifikan seiring kenaikan harga minyak global. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal (*imported inflation*), khususnya melalui jalur energi dan transportasi. Secara tahunan (*y-on-y*), inflasi Kalbar tercatat 3,29%, masih dalam kisaran terkendali.

Namun demikian, pola inflasi menunjukkan bahwa komoditas pangan dan transportasi tetap menjadi penggerak utama, sehingga pengendalian inflasi perlu difokuskan pada komoditas kunci tersebut. Sementara itu, pergerakan harga emas yang cenderung menurun mengikuti tren global memberikan dampak terbatas terhadap inflasi.

Pada bulan Juni 2026, inflasi IHK Kalimantan Barat menurun sebesar 0,31% (*mtm*) di bawah laju inflasi nasional (0,44% *mtm*) dan lebih rendah dibanding inflasi IHK Kalimantan Barat bulan sebelumnya (0,32% *mtm*). Kendati demikian, realisasi inflasi Juni 2026 tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rerata historis bulan Juni selama 3 (tiga) tahun terakhir yang sebesar 0,10% (*mtm*). Realisasi inflasi Kalimantan Barat pada bulan Juni 2026 terutama didorong oleh Transportasi dengan andil inflasi bulanan sebesar 0,18% (*mtm*) serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,04% (*mtm*).

Pada kelompok Transportasi beberapa komoditas pendorong inflasi antara lain: angkutan udara (andil 0,08% *mtm*); bensin (andil 0,07% *mtm*); dan oli mesin (andil 0,03% *mtm*). Inflasi angkutan udara disebabkan oleh kenaikan *fuel surcharge* hingga 50% dari tarif batas atas tiket pesawat ekonomi untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia, di tengah kenaikan permintaan saat periode libur sekolah. Inflasi komoditas bensin disebabkan oleh adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamina yang meningkat sekitar 32% menjadi Rp16.650 per liter per 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan harga oli

mesin disebabkan oleh masih meningkatnya harga bahan baku berbasis minyak bumi akibat dinamika geopolitik global sehingga turut meningkatkan biaya produksi oli mesin sebagai produk turunannya.

Pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga komoditas pendorong inflasi utama adalah lemari pakaian (andil 0,01% mtm). Kenaikan harga didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang tahun ajaran baru, terutama untuk pembelian perlengkapan rumah tangga dan furnitur guna memenuhi kebutuhan keluarga. Selain faktor musiman tersebut, normalisasi harga setelah periode promosi HBKN serta kenaikan biaya distribusi dan harga bahan baku furnitur turut mendorong penyesuaian harga di tingkat eceran.

Pada bulan Juni, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Beberapa komoditas di dalamnya mendominasi penyumbang inflasi secara keseluruhan, yaitu ikan tongkol (andil 0,06% mtm); wortel (andil 0,04% mtm); dan udang basah (andil 0,03% mtm). Kenaikan harga ikan tongkol disebabkan oleh kondisi terbatasnya pasokan imbas transisi musim kemarau yang terjadi di daerah pesisir Kalbar serta adanya kenaikan biaya operasional nelayan untuk bahan bakar dan perawatan kapal. Kenaikan harga udang basah juga disebabkan oleh berkurangnya pasokan di tengah kondisi cuaca yang kurang optimal serta akibat penutupan 4 tambak udang di Kalbar yang belum memenuhi syarat perizinan dan standar budidaya. Sementara itu, kenaikan harga komoditas wortel disebabkan oleh berkurangnya pasokan seiring gangguan panen akibat cuaca ekstrem di daerah sentra produksi luar Kalbar, seperti Jawa Timur.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Januari 2026

- **Harga Avtur Melonjak Tajam** : Harga Avtur per April 2026, mencapai kenaikan lebih dari 70% akibat lonjakan harga minyak global
- **Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi dan Elpiji Nonsubsidi** : Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi pada 18 April 2026. Kenaikan bervariasi mulai dari Rp 6.050,- hingga Rp 9.850,- per liter untuk BBM nonsubsidi dan Rp 17.000,- hingga Rp 36.000,- untuk LPG non subsidi
- **Potensi Produksi Padi Januari-April 2026** : Berdasarkan hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA), potensi produksi padi pada subround 1 2026 diperkirakan mengalami penurunan terutama disebabkan oleh turunnya luas panen yang diperkirakan mencapai 21,15% dibandingkan subround 1 2025
- **Sebagian SPPG Berhenti Beroperasi** : Terhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan berkurangnya penyerapan produksi hasil ternak seperti telur ayam ras dan daging ayam ras
- **Harga Emas Dunia Mengalami Penurunan** : Pada April 2026, harga emas melanjutkan tren koreksi dengan pergerakan fluktuatif namun cenderung menurun dibanding bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, harga emas pada akhir April berada pada kisaran Rp 2,81 juta per gram.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Mei 2026

- **Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi** : Mulai 18 April 2026, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia dan dinamika geopolitik global. Harga LPG pada agen resmi di Kalimantan Barat dipatok Rp. 114.000,- (untuk 5,5kg) dan Rp. 238.000,- (untuk 12kg)
- **Kenaikan Harga Oli dan Sparepart Kendaraan** : Pelemahan nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS dan naiknya harga bahan baku berbasis minyak dan komponen impor berdampak pada naiknya harga oli dan sparepart kendaraan antara 20 hingga 30 persen.

- **Harga Komoditas Pangan :** Harga beberapa komoditas pangan, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai mengalami penurunan seiring meningkatnya produksi/pasokan.
- **Kebijakan Tiket Angkutan Udara :** Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026, PPN atas tarif dasar dan biaya tambahan penumpang ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan. Di sisi lain, biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.
- **Perkembangan Harga Emas Dunia :** Dalam sebulan terakhir, harga emas tercatat mengalami penurunan sebesar 1,19%, namun secara tahunan masih meningkat 35,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Harga emas pada akhir Mei berada pada kisaran Rp 2,7 juta per gram.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Juni 2026

- **Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi :** Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026, dimana harga meningkat dari Rp12.600,- per liter menjadi Rp16.650 per liter atau naik sebesar Rp4.050,- per liter
- **Kebijakan Pemerintah Menyikapi Fluktuasi Harga Avtur :** Kementerian Perhubungan memberlakukan kebijakan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga 50 persen dari tarif batas atas tiket pesawat ekonomi dalam negeri mulai 1 Juni 2026
- **Libur Sekolah Kenaikan Kelas :** Libur akhir semester genap berlangsung mulai 22 Juni hingga 11 Juli 2026. Selanjutnya, Tahun Ajaran Baru 2026/2027 akan resmi dimulai dengan hari pertama masuk sekolah pada Senin, 13 Juli 2026
- **Biaya Operasional Nelayan Meningkat :** Kenaikan harga bahan bakar dan biaya perawatan kapal mendorong peningkatan biaya operasional nelayan
- **Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Terkontraksi :** Pada Juni 2026, harga TBS kelapa sawit di tingkat petani mandiri mengalami gejolak penurunan hingga -8,32 persen di kisaran harga Rp3.221,92 per kg.

Berdasarkan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Neraca Pangan) Provinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, komoditas kedelai mengalami kondisi rentan sepanjang Triwulan II Tahun 2026. Hingga akhir Triwulan I 2026, komoditas beras masih mengalami surplus sebesar 159.866 ton dengan rasio ketahanan 78 hari.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Ketahanan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya untuk memperkuat rantai sistem distribusi pangan dalam pengendalian pasokan dan harga pangan, meningkatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau dan murah bagi konsumen dan masyarakat di Kalimantan Barat.

Adapun capaian kinerja GPM hingga Triwulan ke-II tahun 2026 disimpulkan dapat berjalan

dengan lancar, sesuai dengan yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan terelaisasinya kegiatan yaitu : Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.

Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat adalah berupa belanja Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan melalui pemberian subsidi harga beberapa komoditas bahan pangan strategis, dengan demikian harga jual yang dibayarkan kepada masyarakat lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Besaran selisih harga subsidi tergantung pada kemampuan keuangan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 448.000.000,-, dengan realisasi sampai dengan Triwulan ke-II sebesar Rp. 421.883.350,- atau 94,17 %.

Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selama triwulan ke-II dilaksanakan sebanyak **10 kali**. Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan selain dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan juga dilaksanakan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 H.

Selain itu, pada Triwulan II Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan Operasi Pasar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang dilakukan secara intensif di daerah yang menjadi perhitungan Indeks Harga Konsumen (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sintang, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara) serta menjelang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan bersifat insidental di daerah yang menjadi perhitungan Indeks Perkembangan Harga (Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu). Adapun Komoditi utama yang telah disalurkan meliputi Beras (101.250 Kg), Minyak Goreng (20.250 Liter), Gula Pasir (20.250 Kg) dan Telur (42.000 Butir).

Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi, validitas dan akurasi data untuk memantau Bapokting di Kalimantan Barat, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Sinkronisasi, Validasi dan Akurasi Data Ketersediaan Bahan Pangan dan Bahan Pokok Penting pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 bertempat di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Biro Perekonomian juga menggelar Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa, 9 Juni 2026 bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun beberapa hal yang dibahas antara lain Program inovasi kinerja pengendalian inflasi perangkat daerah, Wasinflasi kinerja TPID Provinsi Kalbar (tantangan & kendala), serta Kondisi terkini komoditas pendorong inflasi (harga, ketersediaan, dan distribusi).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan II tahun 2026 cukup efektif dalam menahan laju inflasi yang rendah dan tetap berada pada rentang $2,5 \pm 1\%$. Hal ini tercermin dari angka inflasi Kalimantan Barat hingga akhir Triwulan II tahun 2026 yang tercatat sebesar 3,28% (yoy). Namun masih terdapat beberapa catatan dari kerangka 4K yang masih diperlukan penguatan guna menjaga sasaran inflasi tetap terjaga di masa yang akan datang, adapun catatan tersebut sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Masih terdapat potensi kenaikan harga aneka cabai, daging, telur ayam ras, horti daun (seperti kangkong, sawi dan bayam) serta bahan bakar rumah tangga karena gangguan distribusi dan produksi akibat cuaca, sehingga perlu dilakukan Monitoring;

- Perlu dilakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) / Operasi Pasar (OP) yang lebih intensif untuk komoditas yang mengalami peningkatan harga (cabai rawit, beras, daging ayam, dan telur ayam);
- Perlu adanya antisipasi dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi terhadap tarif angkutan, biaya logistik dan distribusi barang strategis;
- Terdapat potensi kenaikan permintaan komoditas pangan utama akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, kedelai, susu UHT dan sayuran sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan kecukupan stok agar tidak mengalami kenaikan harga;

2. Ketersediaan Pasokan

- Perlu dilakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami defisit pasokan sebagai antisipasi musim kemarau;
- Terdapat resiko kebakaran hutan yang dapat berdampak pada produksi hortikultura dan distribusi logistik;
- Penguatan nilai tukar ringgit terhadap rupiah menyebabkan adanya resiko penyelundupan Bapokting dari mengingat Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia;
- Perlu adanya antisipasi terhadap komoditas defisit melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).

3. Kelancaran Distribusi

- Realisasi penyerapan gabah/beras CBP perlu dipertahankan melalui perluasan channel penjualan;
- Perlu dukungan keberlanjutan program Keagenan Pengecer Upaya Stabilisasi Komoditi Pangan Krusial (KAPUAS KOMPAK) oleh Bulog;
- Pemangkasan TKD berpengaruh terhadap upaya pengendalian inflasi seperti GPM/OP, subsidi ongkos angkut dan perbaikan infrastruktur jalur distribusi. Oleh sebab itu, perlu optimalisasi belanja daerah selain TKD;
- Terdapat potensi masalah *dwelling time* distribusi dan bongkar muat komoditas bapokting di Pelabuhan.

4. Komunikasi Efektif

- Belum adanya BUMD dan/atau BLUD yang secara khusus berfokus pada pengelolaan bisnis pangan;
- Perlu meningkatkan kualitas neraca pangan daerah guna mengantisipasi pasokan, harga dan sebagai bahan kebijakan produksi;
- Perlu tetap menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat serta mendorong pola konsumsi dan belanja yang bijak, termasuk untuk komoditas BBM dan LPG;
- Perlu adanya komitmen Roadmap TPID 2025-2027 dan Forum KAD dengan mapping program kerja OPD dari hulu-hilir, serta sinkronisasi dengan program pemerintah pusat - daerah (Oplah, CSR, Makan Bergizi Gratis, KDKMP).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦

Dalam mengendalikan inflasi di daerah, diperlukan sinergi beserta penguatan peran TPID yang dapat dilakukan dengan pendekatan kerangka GNPIP melalui kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) dengan usulan rekomendasi sebagai berikut:

1. Keterjangkauan harga

- Monitoring bapokting di pasar referensi harga utama (Pasar Flamboyan di Kota Pontianak dan Pasar Melati di Kab. Ketapang). Komoditi yang dipantau khususnya beras, aneka cabai, daging dan telur ayam ras, horti daun (al. kangkung, sawi, dan bayam) serta LPG 3 kg disertai kegiatan sidak pasar rutin dengan melibatkan instansi terkait;
- Mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) khususnya di Kota Pontianak untuk komoditas dengan tren peningkatan harga seperti cabai rawit, beras, daging ayam, dan telur ayam. GPM/OP/PM agar dilaksanakan di lokasi strategis (pasar/pusat keramaian lainnya) dengan frekuensi/waktu rutin yang diketahui masyarakat;
- Melakukan pemantauan berkala terhadap tarif angkutan, biaya logistik, dan distribusi barang strategis pasca penyesuaian harga BBM nonsubsidi;
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Bulog, distributor, dan pengelola SPPG guna memastikan kecukupan pasokan komoditas pangan utama, terutama beras, telur ayam ras, daging ayam ras, kedelai, susu UHT, dan sayuran, seiring meningkatnya permintaan akibat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Ketersediaan pasokan

- Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami defisit pasokan untuk menyiapkan skema pemenuhan dari daerah surplus melalui distribusi antardaerah dan melakukan percepatan masa tanam untuk mengantisipasi kemarau yang datang lebih awal. Untuk itu perlu dukungan Pemda dan K/L terkait penyediaan benih tahan kemarau, distribusi pupuk subsidi tepat waktu, perbaikan jaringan pompanisasi dan irigasi existing agar berfungsi optimal, serta ketersediaan BBM untuk mendukung operasionalisasi mesin pompa air.
- Mempersiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untukantisipasi risiko kebakaran hutan yang dapat berdampak negatif pada produksi hortikultura dan distribusi logistic;
- Terkait penguatan nilai tukar ringgit terhadap Rupiah, perlu dilakukan pengawasan di wilayah perbatasan terkait risiko penyelundupan bapokting yang dapat berdampak pada pasokan lokal;
- Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penambahan volume KAD eksisting untuk komoditas defisit (aneka cabai dan aneka bawang) dengan dukungan fasilitasi distribusi pangan disertai penguatan koordinasi dengan importir dan distributor guna memastikan kelancaran pengadaan komoditas strategis, khususnya kedelai, gula, pupuk petrokimia, dan sarana produksi pertanian (saprota), sehingga risiko gangguan pasokan akibat volatilitas nilai tukar maupun hambatan rantai pasok global dapat diminimalkan.

3. Kelancaran distribusi

- Mempertahankan penyerapan gabah/beras CBP sesuai target serta mendorong penyaluran beras SPHP secara berkesinambungan melalui perluasan channel penjualan a.l. toko kios modern, mini distribution center (Kios TPID/Toko Inflasi/BUMD), dan/atau GPM/OP/PM.
- Keberlanjutan program Keagenan Pengecer Upaya Stabilisasi Komoditi Pangan Krusial

(KAPUAS KOMPAK) oleh Bulog untuk beras premium dalam menjaga harga di tingkat konsumen.

- Optimalisasi komponen belanja daerah selain TKD (seperti BTT) untuk:
- upaya pengendalian inflasi pangan melalui pelaksanaan GPM/OP/PM rutin di Kalimantan Barat.
- subsidi ongkos angkut untuk bapokting yang terdampak kenaikan biaya logistik dan gangguan rantai pasok dari daerah sentra produksi.
- upaya perbaikan infrastruktur jalur distribusi darat sebagai substitusi jalur distribusi sungai yang berisiko surut saat El Nino atau kemarau panjang.
- Mendorong prioritas bongkar muat komoditas bapokting melalui BUMN logistik/pelayaran dan otoritas pelabuhan pemasok guna memitigasi dampak dwelling time distribusi di pelabuhan.

4. Komunikasi efektif

- Mendorong pembentukan BUMD/BLUD atau diversifikasi bisnis BUMD existing yang fokus menangani bisnis pangan dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar sekitar 20-30%;
- Meningkatkan kualitas neraca pangan daerah, selain itu kondisi neraca pangan daerah perlu disampaikan secara rutin kepada dinas teknis terkait di kab/kota dalam rangkaantisipasi pasokan, harga dan kebijakan produksi lainnya;
- Memperkuat strategi komunikasi kebijakan melalui pengendalian ekspektasi yang terkoordinasi dengan memanfaatkan berbagai forum koordinasi antara kepala daerah, tokoh masyarakat, dan otoritas terkait d.r pengelolaan ekspektasi konsumsi, penggunaan BBM, LPG, dan produk impor;
- Memperkuat strategi komunikasi publik melalui optimalisasi media lokal dan kanal digital resmi TPID, termasuk dashboard inflasi daerah, media sosial, dan siaran yang kredibel dan rutin guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat;
- Melanjutkan komitmen peta jalan TPID 2025-2027 dan Forum KAD antara lain KUPONWAH dan SINGBEBASWAH dengan mapping program kerja OPD dari hulu-hilir, serta sinkronisasi dengan program pemerintah pusat - daerah (Oplah, CSR, Makan Bergizi Gratis, KDKMP).